

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Minggu-Senin, 16-17 Juni 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman Utama)	Minggu, 16 Juni 2019	Trans Sulawesi Masih Lumpuh	Persoalan tata ruang masih menjadi salah satu kendala pemindahan ibukota ke Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, masih banyak konsesi di luar hak guna usaha. Sementara di Kalimantan Timur, salah satu lokasi alternatif ibukota, merupakan kawasan konservasi.
2	Kompas (Halaman, 8)	Minggu, 16 Juni 2019	15 Alat Deteksi Getaran Gempa Dipasang	Sebanyak 15 alat pendeteksi getaran akibat gempa dipasang di Kota Padang, Sumatera Barat. Alat bernama seismic intensity meter itu merupakan hibah dari Pemerintah Jepang yang diserahkan melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Daerah (BPBD) Padang Sutan Hendra mengatakan, alat tersebut dipasang di 11 kantor kecamatan, Balai Kota Padang, Dinas Sosial Padang, serta pusat pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPPD Padang.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 3)	Sabtu, 15 Juni 2019	Target 2020 Dinilai Kurang Realistis	Target investasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada 2020 dinilai kurang realistis karena penanaman modal asing tertahan oleh perlambatan ekonomi global dan dampak perang dagang.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Sabtu, 15 Juni 2019	CMNP Tunggu Revisi RTRW Bandung	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Masih menunggu penyelesaian perubahan rencana tata ruang wilayah dalam proyek jalan tol North South Link di Bandung. Direktur Independen Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Djoko Sapto Mulyo mengatakan, proyek jalan tol North South Link (NS Link) merupakan penambahan ruang lingkup dari jalan tol Soreang – Pasir Koja.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 4)	Senin, 17 Juni 2019	Kemiskinan & Rasio Gini Terus Ditekan	Pemerintah optimistis program pembangunan nasional pada 2020 yang difokuskan pada pengembangan kualitas manusia akan signifikan menurunkan angka kemiskinan dan rasio gini. Dalam sasaran pembangunan 2020, pemerintah mencantumkan sasaran angka kemiskinan sebesar 8,5%—9,0%, sedangkan rasio gini diperkirakan sebesar 0,375—0,380.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Senin, 17 Juni 2019	Desain Ulang Beratkan Pengusaha	Rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengevaluasi pengembangan area tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol dikhawatirkan memberatkan badan usaha jalan tol pengelolanya. Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto menuturkan bahwa apabila tempat istirahat dan pelayanan (rest area) dibuat jauh dari jalan, hal itu akan merugikan pengelola tempat istirahat.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Senin, 17 Juni 2019	PUPR Fokus Penyelesaian Proyek Bendungan	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bakal melanjutkan program pembangunan 65 bendungan hingga 2023 dengan tidak mengalokasikan anggaran pembangunan bendungan baru pada 2020. Proyek 15 bendungan baru direncanakan dimulai lagi pada 2021.

8	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Senin, 17 Juni 2019	Kuota FLPP Mungkin Tak Ditambah	Anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tahun ini nyaris ludes. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperkirakan tidak akan menambah kuotanya hingga akhir tahun ini.
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Senin, 17 Juni 2019	Investor Milenial Naik	Investor properti dari generasi milenial terus mengalami peningkatan, bahkan mereka berani membeli properti di luar negeri tanpa pernah mendatangi lokasinya secara langsung. Berdasarkan riset yang dilansir Bloomberg Intelligence, Minggu (16/6), bahwa saat ini ada kenaikan lebih dari 60% pembelian properti oleh generasi milenial di China. Jumlah transaksinya mencapai US\$740 juta atau setara dengan Rp10,50 triliun pada 2018. Angka itu diproyeksikan meningkat dua kali lipat pada 2019
10	Media Indonesia (Halaman, 12)	Senin, 17 Juni 2019	2 Bulan lagi kuota KPR Bersubsidi Habis	Kuota Pembiayaan rumah bersubsidi sebesar 168 ribu unit diperkirakan habis pada Juli atau Agustus mendatang. Dengan masih tingginya permintaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan rumah bersubsidi yang dilakukan pengembang, habisnya kuota rumah bersubsidi ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebab bisa berdampak panjang bagi konsumen dan developer.
11	Kompas (Halaman, 16)	Senin, 17 Juni 2019	Tata Ruang Kalimantan Mendesak Direvisi	Persoalan tata ruang masih menjadi salah satu kendala pemindahan ibukota ke Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, masih banyak konsesi di luar hak guna usaha. Sementara di Kalimantan Timur, salah satu lokasi alternatif ibukota, merupakan kawasan konservasi. Hal itu mengemuka dalam seminar "Menyambut Ibukota Pemerintahan NKRI" yang diselenggarakan Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia di Palangkaraya, Sabtu (15/6/2019). Hadir sebagai pembicara Gubernur Kalteng periode 2005-20015 Agustin Teras Narang dan Deputy Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambur Alue Dohong.

Judul	Trans Sulawesi Masih Lumpuh	Tanggal	Minggu, 16 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Persoalan tata ruang masih menjadi salah satu kendala pemindahan ibukota ke Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, masih banyak konsesi di luar hak guna usaha. Sementara di Kalimantan Timur, salah satu lokasi alternatif ibukota, merupakan kawasan konservasi.		

Trans-Sulawesi Masih Lumpuh

Banjir di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara melumpuhkan aktivitas warga. Lingkungan wajib dipulihkan untuk mencegah banjir terulang.

KONAWA, KOMPAS — Jalur Trans-Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Konawe dan Kolaka Timur hingga kemarin masih terendam air setinggi hingga 1,5 meter di beberapa titik. Banjir juga masih merendam semua jalur transportasi di wilayah Konawe Utara.

Air setinggi 1,5 meter merendam jalur Trans-Sulawesi, tepatnya di Desa Hongoa, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sabtu (15/6/2019). Akibatnya, akses transportasi pun lumpuh. Seminggu terakhir dilanda banjir, ketinggian air bahkan hanya surut beberapa sentimeter.

Murhum (35), warga setempat, menuturkan, banjir yang merendam jalan dengan ketinggian lebih dari 1 meter telah berlangsung empat hari. Banjir yang sampai memutus jalur transportasi baru kali ini terjadi. Biasanya, air merendam jalan dengan ketinggian maksimal 30 sentimeter.

Banjir dengan tinggi lebih dari 1 meter dan telah berlangsung sehari-hari praktis melumpuhkan aktivitas keseharian warga. "Mau ke mana-mana tidak bisa. Sawah dan kebun terendam semua. Sawah baru umur satu bulan itu pasti sudah habis. Merica yang sebentar lagi panen apalagi," tutur Masmur (53), warga desa lainnya.

Rumah Masmur pun terendam air hingga 1 meter. Sebagian barang-barangnya tidak mampu diselamatkan dan terus terendam air.

Di depan rumahnya, air menggenangi jalan Trans-Sulawesi setinggi 1,5 meter. Banjir merendam jalan sepanjang sekitar 3 kilometer. Pengendara roda dua yang ingin melintas harus menaiki rakit agar kendaraan mereka tidak terendam air. Puluhan mobil jenis minibus harus dinaikkan ke truk atau trailer untuk melintas.

Jalur ini bukan satu-satunya yang terendam air. Sejumlah ruas jalan lain juga tergenang

sebelum mencapai ibu kota Kabupaten Konawe. Pengendara belum bisa melintas hingga Kabupaten Kolaka Timur karena putusnya Jembatan Ameroro. Meski upaya pemulihan mulai dilakukan dengan menimbun memakai tanah, jembatan masih belum bisa dilalui.

Di wilayah Kabupaten Konawe Utara, banjir juga masih merendam enam kecamatan dan jalur Trans-Sulawesi menuju Sulawesi Tengah. Jembatan Asera yang ambrol juga belum bisa dilalui.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe Utara Rahmatullah menyampaikan, semua jalur itu masih terendam banjir seperti hari-hari sebelumnya. Air mulai berangsur surut meski lambat. "Untuk distribusi logistik masih mengandalkan jalur udara," ujar Rahmatullah.

Dengan kondisi itu, pengiriman bantuan ke warga terdampak dilakukan secara bertahap. Selain dengan jalur udara, satu kapal milik TNI AL juga membantu penyaluran bantuan. Perahu karet dan rakit juga digunakan untuk terus mengirim bahan makanan pokok, air minum, dan beragam kebutuhan lain.

Rahmatullah mengklaim, semua daerah yang terisolasi telah mendapatkan bantuan. "Hari ini ada 15 ton bantuan yang disalurkan. Semua lokasi telah bisa dijangkau. Kami berharap banjir segera surut dan bantuan kepada warga bisa terdistribusi maksimal," katanya.

Banjir yang merendam empat kabupaten di wilayah Sultra memutus sejumlah jalur transportasi utama. Selain jembatan ambrol dan jalur yang tergenang, sejumlah jalan juga longsor dan rusak parah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sultra Abdul Rahim belum bisa dihubungi terkait

Trans-Sulawesi Masih Lumpuh

(Sambungan dari halaman 1)

penanganan jalan rusak ataupun tertimbun longsor.

Banjir selama dua minggu terakhir di Sultra telah menyebabkan sekitar 10.000 keluarga terdampak. Puluhan ribu warga mengungsi di sejumlah pengungsian.

Rusaknya wilayah hulu dan kritisnya kondisi daerah aliran sungai (DAS) membuat banjir begitu parah.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra Saharuddin menengarai, kondisi ini terjadi karena maraknya pembukaan kawasan industri, khususnya pertambangan dan perkebunan skala masif. Ia mendesak pemerintah segera merevisi izin yang dikeluarkan serta melandaskan semuanya pada analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis.

Banjir Kalimantan Timur

Di Kalimantan Timur, banjir yang menggenangi sebagian besar Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda, kemarin, mulai surut. Namun, masyarakat di Mahakam Ulu masih me-

waspadai potensi banjir kiriman karena dikabarkan terjadi hujan besar di hulu Sungai Mahakam.

Air Sungai Mahakam mulai naik ke permukiman di sekitarnya sejak Kamis pukul 20.00 Wita akibat intensitas hujan yang tinggi. Hal itu terus terjadi hingga genangan air mencapai 2 meter di beberapa lokasi.

Sejak Jumat siang, air perlahan surut. Saat ini, ketinggian air sekitar 70 sentimeter. Lebih kurang 1.000 jiwa di Mahakam Ulu terdampak banjir ini.

"Kebutuhan makanan, minuman, dan pengungsian sudah kami sediakan untuk pengungsi di Kecamatan Long Bagun. Sebagian warga ada yang mulai membersihkan rumah," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Mahakam Ulu Engelbertus Ibrahim.

Sejak kemarin siang, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh mulai mengunjungi sejumlah desa terdampak. Dinas Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu juga masih memetakan wilayah terdampak.

Ding Kueng, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Pe-

ngulangan Bencana Dinas Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, mengatakan, wilayah hilir Mahakam Ulu mulai terdampak banjir, seperti di Kecamatan Long Hubung dan Laham.

"Air dari Long Bagun mulai menuju hilir Sungai Mahakam. Kami masih meninjau lokasi-lokasi itu. Kami tetap meminta masyarakat waspada karena masih ada hujan di hulu Sungai Mahakam," kata Kueng.

Di Samarinda, masa tanggap bencana banjir diperpanjang hingga 21 Juni. Genangan air sudah mulai surut meski ketinggian air di beberapa titik masih sekitar 50 sentimeter.

Dinas Kesehatan Samarinda pun memperbanyak posko kesehatan di titik-titik yang terdampak parah untuk mengantisipasi penyebaran penyakit. Puskesmas di setiap kelurahan dan kecamatan membuka layanan 24 jam. Pasokan obat juga disediakan untuk menanggulangi berbagai penyakit, seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut, gatal-gatal, darah tinggi, dan flu.

Pusat Pengendalian Operasi BPBD Samarinda mencatat,

jumlah warga terdampak banjir bertambah menjadi 56.123 jiwa atau 17.485 keluarga. Sebelumnya, warga terdampak 36.475 jiwa atau 12.397 keluarga di tiga kecamatan, yakni Samarinda Ulu, Sungai Pinang, dan Samarinda Utara.

Operator Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kota Samarinda, Aditya, mengatakan, jumlah korban banjir yang dirawat di rumah sakit masih didata. Setidaknya 35 orang dilarikan ke rumah sakit dengan berbagai keluhan, seperti demam, muntah, dan pusing.

Seperti diberitakan Kompas (15/6), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan, hujan dengan intensitas tinggi di Kalimantan Timur masih bertahan hingga akhir bulan. Peningkatan hujan ini akibat pergerakan Madden-Julian Oscillation (MJO) di wilayah dengan zona iklim ekuatorial. MJO saat ini berada di Indonesia bagian tengah, termasuk Kalimantan Timur.

Ketua Forum DAS Kaltim, Mislan, mengatakan, pemerintah perlu membuat program berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim dan alam.

(GAL/CIP)

(Bersambung ke him 11 kol 1-4)

Judul	15 Alat Deteksi Getaran Gempa Dipasang	Tanggal	Minggu, 16 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 8)		
Resume	Sebanyak 15 alat pendeteksi getaran akibat gempa dipasang di Kota Padang, Sumatera Barat. Alat bernama seismic intensity meter itu merupakan hibah dari Pemerintah Jepang yang diserahkan melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Daerah (BPBD) Padang Sutan Hendra mengatakan, alat tersebut dipasang di 11 kantor kecamatan, Balai Kota Padang, Dinas Sosial Padang, serta pusat pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPPD Padang.		

15 Alat Deteksi Getaran Gempa Dipasang

PADANG, KOMPAS — Sebanyak 15 alat pendeteksi getaran akibat gempa dipasang di Kota Padang, Sumatera Barat. Alat bernama *seismic intensity meter* itu merupakan hibah dari Pemerintah Jepang yang diserahkan melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Sutan Hendra mengatakan, alat tersebut dipasang di 11 kantor kecamatan, Balai Kota Padang, Dinas Sosial Padang, serta Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD Padang.

"Sejauh ini, alat baru dipasang di Pusdalops BPBD Padang dan kantor Dinas Sosial Padang. Pemasangan ditargetkan selesai seminggu ini," kata Sutan, Sabtu (15/6/2019).

Pemasangan alat itu tidak lepas dari potensi gempa dari patahan raksasa segmen Mentawai. Patahan itu berpotensi melepas energi gempa bermagnitudo 8,8 diikuti tsunami.

Pada 30 September 2009, Padang diguncang gempa bermagnitudo 7,6 yang menewaskan 1.117 jiwa dan ribuan lainnya

luka-luka. Pemerintah Kota Padang pun terus berupaya melakukan mitigasi bencana.

Berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan BMKG, alat itu berguna untuk mengestimasi tingkat getaran akibat gempa bumi dengan cepat. Hasil pengamatan tingkat guncangan dari alat ini lantas dianalisis untuk dijadikan salah satu parameter dalam memonitor potensi tingkat dampak kerusakan dari gempa.

Fungsi utama alat tersebut untuk mendeteksi guncangan pada peralatan tertentu akibat gempa, bukan untuk mengukur kekuatan gempa. Perangkat itu juga berfungsi mengirimkan data hasil pengamatan secara otomatis melalui jaringan internet ke BMKG di Jakarta.

Skala yang digunakan alat ini adalah *modified mercalli intensity* (MMI) dengan rentang tingkatan I-XII. Data yang diterima oleh sensor alat akan terkirim langsung ke BMKG di Jakarta sehingga kerja BPBD semakin mudah karena tidak perlu mengirimkan data secara manual via surel ataupun aplikasi Whatsapp.

"Hasil pengukuran juga lebih akurat. Selama ini kita mengukurnya dengan merasakan saja, kemudian diperkirakan berapa MMI yang terasa," ujar Sutan.

Ia menambahkan, untuk di Sumbar, alat pendeteksi ini baru ada di Kota Padang. Bantuan alat dari Jepang itu menambah peralatan pendeteksi gempa di kota rawan gempa ini. April lalu, tiga pendeteksi getaran gempa yang merupakan proyek percontohan dari Universitas Telkom Bandung juga dipasang di tiga titik di Padang.

Secara terpisah, Staf Manajemen Seismologi Teknik BMKG Tuti Daswenti mengatakan, selain di Padang, peralatan dari Pemerintah Jepang itu juga dipasang hampir di semua provinsi yang rawan gempa. "Total ada 200 alat yang dipasang. Paling banyak di Jakarta dengan 40 alat," katanya.

Daerah lain yang mendapat bantuan peralatan di antaranya Banten, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Semarang, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Bengkulu, dan DKI Jakarta. (JOL)

Judul	Target 2020 Dinilai Kurang Realistis	Tanggal	Sabtu, 15 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 3)		
Resume	Target investasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada 2020 dinilai kurang realistis karena penanaman modal asing tertahan oleh perlambatan ekonomi global dan dampak perang dagang.		

Target 2020 Dinilai Kurang Realistis

Bisnis, JAKARTA — Target investasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada 2020 dinilai kurang realistis karena penanaman modal asing tertahan oleh perlambatan ekonomi global dan dampak perang dagang.

Hal itu dikemukakan oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara.

Dia menambahkan, investasi yang berasal dari belanja modal pemerintah juga sulit untuk didorong tinggi karena akan menyebabkan rasio pajak makin berat. Hal itu dikhawatirkan membuat defisit anggaran melebar.

Di sisi lain, lanjutnya, untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) bergantung pada strategi BUMN dalam memacu proyek infrastruktur, di tengah kondisi utang BUMN yang meningkat pesat. Adapun, volatilitas makro dapat menaikkan risiko pendanaan.

"Jadi *outlook* investasi masih lambat. PMTB [pembentukan modal tetap bruto] bisa tumbuh 5%–6% saja sudah bagus untuk 2020," ujarnya kepada *Bisnis*, Jumat (14/6).

Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak terlalu *over estimate* dalam menetapkan target pada APBN 2020. Apalagi, tahun depan ada pemilu di Amerika Serikat (AS) yang berpotensi menimbulkan eskalasi baru.

Pasalnya, menjelang pemilu AS, Presiden Donald Trump dikhawatirkan akan menggunakan instrumen perang dagang sebagai senjata politik. Jika demikian, eskalasi tidak dapat dihindarkan dan dapat berpengaruh terhadap keputusan investasi.

DORONG PERTUMBUHAN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2020 yang dipatok antara 5,3%–5,6%, pemerintah memerlukan

PMTB di angka 7%–7,4%.

Artinya dengan kebutuhan tersebut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% diperlukan investasi sebesar Rp5.802,6 triliun dan Rp5.823,2 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%.

Investasi dari sektor swasta atau masyarakat juga menjadi tumpuan dari pencapaian target tersebut. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kebutuhan PMTB dari sektor swasta mencapai Rp4.221,3 triliun untuk pertumbuhan ekonomi 5,3%.

"Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,6% peranan investasi swasta menjadi sangat penting sehingga *policy-policy* yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi sangat kunci," ujar Sri di hadapan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/6).

Sri Mulyani tak menampik bahwa pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah untuk mencapai target tersebut. Di antaranya mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pasar tenaga kerja yang kondusif.

Di samping itu, pemerintah juga akan menggunakan instrumen fiskal APBN untuk mendukung kebutuhan investasi dari sisi *demand*.

Sri Mulyani memperkirakan sektor ekonomi yang akan memiliki pertumbuhan relatif tinggi masih didominasi oleh sektor jasa, terutama perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi serta sektor jasa keuangan.

Sementara itu, sektor konstruksi diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5% hingga 6%.

"Yang kita lihat di sini adalah industri pengolahan yang kita harapkan akan bisa meningkat, meskipun dalam level yang sangat-sangat moderat," tegas Menkeu. (*Puput Ady Sukarno*)

Judul	CMNP Tunggu Revisi RTRW Bandung	Tanggal	Sabtu, 15 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Masih menunggu penyelesaian perubahan rencana tata ruang wilayah dalam proyek jalan tol North South Link di Bandung. Direktur Independen Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Djoko Sapto Mulyo mengatakan, proyek jalan tol North South Link (NS Link) merupakan penambahan ruang lingkup dari jalan tol Soreang – Pasir Koja.		

CMNP Tunggu Revisi RTRW Bandung

Bisnis, JAKARTA — PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. masih menunggu penyelesaian perubahan rencana tata ruang wilayah dalam proyek jalan tol North South Link di Bandung.

Direktur Independen Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Djoko Sapto Mulyo mengatakan, proyek jalan tol North South Link (NS Link) merupakan penambahan ruang lingkup dari jalan tol Soreang—Pasir Koja.

Penambahan ruang lingkup telah disampaikan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR).

“Sekarang ‘bolanya’ di pemda dan sedang dalam pembahasan dengan DPRD. Kalau dari sisi kami internal, konstruksi sudah siap,” ujarnya kepada *Bisnis*, beberapa waktu lalu.

Sekadar catatan, CMNP telah menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT Girder Indonesia sebagai kontraktor yang akan menggarap proyek jalan tol NS Link sepanjang 14,3 kilometer. Kerja sama konstruksi akan menggunakan skema *contractor pre-financing* (CPF) atau pengerjaan proyek dilakukan terlebih dahulu oleh kontraktor, kemudian dibayar oleh badan usaha jalan tol (BUJT) saat proyek selesai.

Dalam catatan *Bisnis*, studi pembangunan jalan tol dalam Kota Bandung sudah dimulai sejak 2013. Jalan tol NS Link akan dibangun dengan konstruksi layang (*elevated*), dimulai dari kawasan Pasir Koja, Jalan Gatot Subroto, hingga ke berakhir di pusat Kota Bandung.

Di lain pihak, BPJT mendorong

Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencanangan pembangunan jalan tol NS Link.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan pemda perlu menyatakan bahwa proyek jalan tol tersebut masuk dalam agenda pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. “Pemerintah daerah *men-declare* [menyatakan] bahwa itu akan menjadi koridor penting bagi pembangunan Bandung Raya,” tuturnya.

Di sisi lain, CMNP juga masih menunggu evaluasi desain konstruksi jalan tol pelabuhan atau Harbour Road. Proyek ini merupakan penambahan ruang lingkup dari ruas jalan tol Cawang—Tanjung Priok—Ancol Timur—Jembatan Tiga atau Tol Wiyoto Wiyono.

Djoko menerangkan, jalan tol pelabuhan dibangun untuk memperlancar arus kendaraan menuju Pelabuhan Tanjung Priok karena jalan tol eksis sudah padat. Jalan tol baru tersebut akan dibangun sepanjang 9,5 kilometer di atas jalan tol eksis.

“[Dampak] yang jelas dengan adanya jalan tol ini, [*volume capacity*] V/C ratio [rasio volume berbanding kapasitas] harus di bawah 1 dan sekarang sudah di atas 1. Mau tidak mau harus tambah lagi [jalan tol].” jelasnya.

Berdasarkan kajian awal yang dibuat CMNP, jalan tol pelabuhan tersebut akan dibangun dengan tiga lajur sehingga kapasitas jalan bisa menampung kendaraan sebanyak 150.000 per hari.

Menurutnya, jumlah kendaraan sebanyak ini bakal membuat V/C ratio turun di bawah 1. (*Rivki Maulana*)

Judul	Kemiskinan & Rasio Gini Terus Ditekan	Tanggal	Senin, 17 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 4)		
Resume	Pemerintah optimistis program pembangunan nasional pada 2020 yang difokuskan pada pengembangan kualitas manusia akan signifikan menurunkan angka kemiskinan dan rasio gini. Dalam sasaran pembangunan 2020, pemerintah mencantumkan sasaran angka kemiskinan sebesar 8,5%—9,0%, sedangkan rasio gini diperkirakan sebesar 0,375—0,380.		

Kemiskinan & Rasio Gini Terus Ditekan

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah optimistis program pembangunan nasional pada 2020 yang difokuskan pada pengembangan kualitas manusia akan signifikan menurunkan angka kemiskinan dan rasio gini.

Hadijah Alaydrus
hadijah.alaydrus@bisnis.com

Dalam sasaran pembangunan 2020, pemerintah mencantumkan sasaran angka kemiskinan sebesar 8,5%—9,0%, sedangkan rasio gini diperkirakan sebesar 0,375—0,380.

Selain itu, pemerintah juga mencantumkan perkiraan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,51 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,8%—5,1%.

Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, pihaknya optimistis tingkat kemiskinan dan rasio gini terus mengalami perbaikan ke depannya.

"Tingkat kemiskinan telah turun menjadi 9,82% pada Maret 2018 dan terakhir menjadi 9,66% pada September 2018. Ini diperkirakan terus turun menuju 8,5% pada 2019," ungkap Bambang, Kamis (13/6).

Rasio gini atau ketimpangan juga diperkirakan

► Fokus perbaikan masyarakat di perkotaan dapat mendorong perbaikan rasio gini yang signifikan.

dapat terus turun ke kisaran 0,380 pada tahun ini dari posisi 0,384 pada akhir 2018. Menurut Bambang, perbaikan rasio gini menjadi 0,384 dalam 4 tahun terakhir disumbang oleh perbaikan ketimpangan di perkotaan. Ke depannya, dia melihat fokus perbaikan pendapatan masyarakat di perkotaan dapat mendorong perbaikan rasio gini yang signifikan.

Sementara itu, tingkat pengangguran per Agustus 2018 telah mencapai 5,34%. Bambang menuturkan, perbaikannya sebenarnya telah menyentuh hampir 5,0% pada 2019. Dia meyakini bahwa pertumbuhan lapangan kerja sebesar 2,6%—2,9% pada 2019 akan terus menekan angka pengangguran.

Adapun, yang menjadi masalah saat ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda. TPT usia 15 tahun—19 tahun mencapai 27% dan TPT usia 20 tahun—24 tahun sebesar 16,7%.

Dengan fokus pembangunan ekonomi yang tidak lagi terpusat di Jawa, pemerintah optimistis jurang ketimpangan ekonomi akan menyempit. Pada sisi lain, distribusi pembangunan yang merata diharapkan dapat menekan angka kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.



Pertumbuhan Ekonomi	2018*	2019**	2020****
	5,17%	5,3%	5,3%—5,6%

Tingkat Kemiskinan	2018*	2019***	2020****
	9,82%	8,5%—9,5%	8,5%—9,0%

Rasio Gini	2018*	2019**	2020****
	0,389	0,385	0,375—0,380

Tingkat Pengangguran Terbuka	2018*	2019***	2020****
	5,34%	4,8%—5,2%	4,8%—5,1%

sekolah menengah. Untuk Indeks Pembangunan Ma-

Ket:
*Realisasi,
**realisasi Mar 2018,
***target,
****kerangka usulan

Sumber:
Bappenas
BISNIS/
TRI UTOMO



Selain itu, dia memaparkan pengangguran lulusan SMK pada 2018 mencapai 11,24%, lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran lulusan SMA. "Harusnya figurinya terbalik, tetapi ironisnya SMK lebih banyak yang menganggur."

Oleh karena itu, pengembangan vokasi ke depannya menjadi perhatian untuk

nusia (IPM) ditargetkan mencapai 72,51 pada 2020. Adapun, realisasi pada akhir 2018 telah mencapai 71,39. Perbaikan ini disumbang oleh kenaikan angka harapan hidup yang telah mencapai 71,20 pada 2018 dan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun yang meningkat menjadi 8,17 tahun.

Menurut Bappenas, IPM Indonesia yang mencapai di atas 70 artinya Indonesia telah menjadi *high human development index*.

Bambang menambahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 akan difokuskan pada pengembangan manusia di mana tema besarnya adalah 'Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.'

Dalam RKP ini, pengembangan manusia dan pengentasan kemiskinan akan menjadi fokus utama.

KONDISI SULIT

Direktur Eksekutif CORE Indonesia M. Faisal menyangsikan kerangka usulan sasaran pembangunan akan tercapai dengan mudah di tengah kondisi saat ini. "Besarnya kemungkinan tidak tercapai,

kecuali ada terobosan-terobosan baru untuk melakukan akselerasi yang ditargetkan," ujar Faisal, Minggu (16/6).

Misalnya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, Faisal menilai efektivitas dana desa dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan.

Efektivitas program ini berbeda-beda antardaerah, khususnya di luar Jawa, sehingga perlu dievaluasi. Di samping itu, dia menilai penanganan khusus untuk kemiskinan di perkotaan atau *urban poverty* perlu ditingkatkan karena penduduk Indonesia saat ini lebih banyak dibandingkan dengan penduduk desa.

Khusus untuk IPM, Faisal menilai bidang pendidikan dan kesehatan diakselerasi terus agar indeksnya terus meningkat. "Bukan hanya menekan tingkat pengangguran terbuka, tapi kualitas pekerjaan yang diciptakannya rendah," kata Faisal.

Oleh karena itu, penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas perlu ditingkatkan dengan mendorong investasi langsung sejalan dengan pengembangan SDM. □

Judul	Desain Ulang Beratkan Pengusaha	Tanggal	Senin, 17 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengevaluasi pengembangan area tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol dikhawatirkan memberatkan badan usaha jalan tol pengelolanya. Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto menuturkan bahwa apabila tempat istirahat dan pelayanan (rest area) dibuat jauh dari jalan, hal itu akan merugikan pengelola tempat istirahat.		

► TEMPAT ISTIRAHAT DI TOL

Desain Ulang Beratkan Pengusaha

Bisnis, JAKARTA — Rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengevaluasi pengembangan area tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol dikhawatirkan memberatkan badan usaha jalan tol pengelolanya.

Krizia P. Kinanti
krizia.putri@bisnis.com

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto menuturkan bahwa apabila tempat istirahat dan pelayanan (*rest area*) dibuat jauh dari jalan, hal itu akan merugikan pengelola tempat istirahat.

"Kejadian ramai *kan* setahun dua kali, kalau hari biasa kasih pengelola *rest area* sepi apalagi

kalau *parkiran* jauh masuk apa tidak tambah sepi kalau hari biasa?" ujarnya kepada *Bisnis*, Jumat (14/6).

Selain itu, Herwi menuturkan bahwa untuk merombak tempat istirahat yang sudah jadi memerlukan biaya yang banyak dan pasti akan memberatkan pengelola. "Biayanya yang terlalu berat, *rest area* itu marginnya tipis banget."

Menurut Herwi, daripada merombak tempat istirahat dengan biaya besar akan lebih baik saat perhelatan besar seperti Lebaran

► Salah satu dinamika yang bisa dijadikan referensi adalah konsep *motorway service area*. PUPR akan mengevaluasi letak tempat istirahat agar tidak persis di pinggir jalan tol.

atau tahun baru menyiasatinya

dengan melakukan rehabilitasi dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Chief Astra Infra Solution yang juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Jalan Tol Indonesia Krist Ade Sudyono menuturkan bahwa pihaknya menyambut baik upaya penataan untuk perbaikan termasuk wacana melakukan evaluasi desain.

"Evaluasi ulang desain ini tentunya bukan hanya menyangkut tata letak dan redesain fasilitas fasilitas yang ada di *rest area*,

tetapi segyanya juga disesuaikan dengan dinamika tujuan, model, dan juga kegiatan ekonomi yang dimungkinkan di *rest area* tersebut," ujarnya.

Menurut Kris, salah satu dinamika yang bisa dijadikan referensi adalah konsep *motorway service area* karena selain digunakan untuk tempat beristirahat, pengisian bahan bakar kendaraan, makan dan minum, keberadaannya juga bisa digunakan untuk titik pertemuan, pemberhentian, pusat berbelanja, dan tempat menginap baik dalam waktu tertentu maupun semalaman.

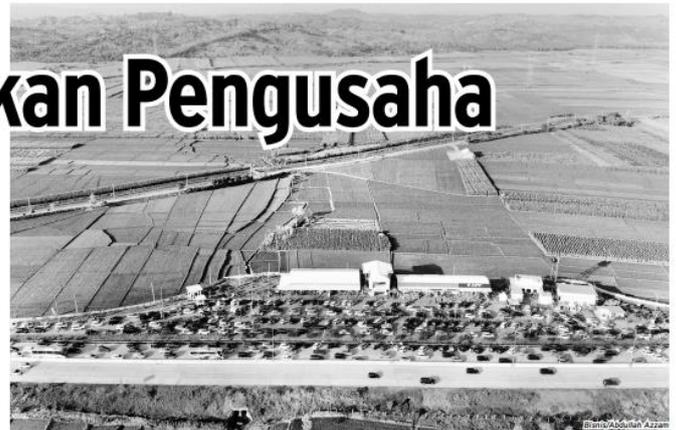
Untuk bisa mengembangkan konsep ini, tentunya, tempat istirahat perlu terintegrasi dan mendapatkan berbagai akses. Penggunaannya harus variatif dan terintegrasi dengan jaringan moda transportasi lain.

Konsep ini akhirnya akan men-

dorong ke arah pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan moda transportasi (*transit oriented development*) dengan jalan tol merupakan bagian dari jaringan moda transportasi dari TOD tersebut.

"Mungkin isu yang akan muncul adalah kebutuhan luasan tanah yang tersedia di *existing rest area* maupun *rest area* baru. Di beberapa tempat membutuhkan tambahan tanah," katanya.

Dalam perspektif ini, Kris mengatakan bahwa jelas evaluasi dan desain ulang tempat istirahat yang



diwacanakan oleh Kementerian PUPR, segyanya bukan hanya berfokus pada isu-isu teknis, tetapi juga harus mencakup isu konseptual, bisnis model, dan pelayanan dari tempat istirahat area maupun jalan tol itu sendiri.

UBAH DESAIN

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengemukakan bahwa pihaknya akan mengubah desain dari tempat istirahat dan pelayanan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada musim mudik Lebaran pada masa mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa berdasarkan pantauan dari arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, pihaknya akan membangun tempat

istirahat dengan dua kondisi ke depannya.

"Orang kita ini *kan* malas, bukannya apa, mungkin sudah capek jadi, misalnya, mau ke toilet, turun mobil maunya depannya toilet. Malas jalan. Itu akan coba kami

evaluasi, misalnya, parkirnya agak jauh seperti di *supermarket* itu," ujarnya. (*Bisnis*, 11 Juni)

Selain itu, Basuki menambahkan bahwa pihaknya juga akan mengevaluasi letak tempat istirahat agar tidak persis di pinggir jalan tol, sehingga tidak menghambat kendaraan yang melintas. Sebagai percontohan adalah tempat istirahat dan pelayanan yang terletak di Ungaran, Jawa Tengah yang berada di KM 429 pada ruas jalan tol Semarang—Solo. Tempat istirahat ini diklaim termegah di

Indonesia.

Ke depannya, TIP ini akan menjadi destinasi wisata dengan adanya penginapan dan penyewa-penyewa tempat berjualan yang lengkap.

Basuki juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan ter-

kait dengan penambahan fungsi TIP sebagai terminal seiring dengan evaluasi tempat istirahat pada masa mendatang.

"Itu kemarin saya bilang Pak Menhub, misalnya, mau dipakai terminal tol harus didesain masuk, bukan yang *kayak* sekarang ini *existing*. *Wah*, itu bahaya!" paparnya.

Penambahan fungsi terminal di dalam TIP juga mencuat setelah Kementerian Perhubungan meng-gagas trayek bus Trans-Jawa yang sepenuhnya melintas jalan tol. ■

Judul	PUPR Fokus Penyelesaian Proyek Bendungan	Tanggal	Senin, 17 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bakal melanjutkan program pembangunan 65 bendungan hingga 2023 dengan tidak mengalokasikan anggaran pembangunan bendungan baru pada 2020. Proyek 15 bendungan baru direncanakan dimulai lagi pada 2021.		

► SUMBER DAYA AIR

PUPR Fokus Penyelesaian Proyek Bendungan

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bakal melanjutkan program pembangunan 65 bendungan hingga 2023 dengan tidak mengalokasikan anggaran pembangunan bendungan baru pada 2020. Proyek 15 bendungan baru direncanakan dimulai lagi pada 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa hingga 2023, pihaknya bakal meneruskan pembangunan 36 bendungan lanjutan yang belum selesai. Konstruksi 36 bendungan ini akan ram-

pung dalam periode 2020—2023 atau rata-rata sembilan bendungan per tahun.

"Kami usulkan tidak ada pembangunan bendungan baru karena pengalaman tahun keempat kami agak tertatih disibukkan dengan tahun politik. Pembangunan bendungan baru kami mulai lagi pada 2021 sambil menyelesaikan 36 bendungan [lanjutan]," ujarnya, pekan lalu.

Pemerintah telah mencanangkan pembangunan 65 bendungan pada 2015—2019 yang seluruhnya selesai pada 2023. Pembangunan bendungan gencar dilakukan

agar cadangan air meningkat.

Menurut Basuki, cadangan air nasional terbilang rendah karena hanya 11% dari lahan irigasi seluas 7,20 juta hektare yang mendapat pasokan air dari bendungan.

Dia menambahkan bahwa mulai 2021 hingga 2023, Kementerian PUPR bakal membangun 15 bendungan baru atau lima bendungan per tahun sambil menyelesaikan proyek yang ada.

Sementara itu, hingga akhir 2019, sebanyak 15 bendungan baru dijadwalkan rampung, menyusul 14 bendungan yang

sebelumnya sudah tuntas dibangun.

Ke-15 bendungan yang akan selesai tahun ini yaitu Bendungan Gongseng, Karalloe, Tapin, Passeloreng, Bintang Bano, Way Sekampung, Ladongi, Napun Gete, Ciawi, Sukamahi, Karian, Keureuto, Gondang, Marangkayu, dan Kuningan.

Basuki menuturkan bahwa pembangunan bendungan memerlukan waktu yang tidak singkat. Konstruksi bendungan memerlukan waktu 3 tahun hingga 4 tahun. Oleh karena itu, skema pengang-

garan untuk pembangunan bendungan menggunakan tahun jamak.

Di sisi lain, Kementerian PUPR juga berniat membuka lelang proyek bendungan baru dalam waktu dekat.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, dalam 6 bulan terakhir, belum ada lelang baru dalam proyek pembangunan bendungan.

Sejauh ini, Kementerian PUPR telah mengumumkan pemenang lelang proyek Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, proyek bendungan terakhir yang dilelang pada 2018. *(Rivki Maulana)*

Judul	Kuota FLPP Mungkin Tak Ditambah	Tanggal	Senin, 17 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tahun ini nyaris ludes. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperkirakan tidak akan menambah kuotanya hingga akhir tahun ini.		

► ANGGARAN BANTUAN PERUMAHAN

Kuota FLPP Mungkin Tak Ditambah

Bisnis, JAKARTA — Anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tahun ini nyaris ludes. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperkirakan tidak akan menambah kuotanya hingga akhir tahun ini.



Mutiara Nabila
redaksi@bisnis.com

Berdasarkan catatan *Bisnis*, tahun ini anggaran untuk subsidi selisih bunga (SSB) hanya 100.000 unit dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya 68.000 unit.

► Kuasa untuk menambah anggaran pembiayaan perumahan berada di tangan Kementerian Keuangan, anggaran mungkin baru akan ada tahun depan.

Jumlah itu jauh dari tahun lalu yang jumlah keseluruhannya mencapai 280.000-an unit. Dengan turunnya anggaran tersebut, pengembang ragu Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang Atas Penyerahannya Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak akan teresap. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Adang Sutara meng-

pengembang sudah merespons dengan baik juga, salah satunya di Bandung, ada juga beberapa penghuni rusun yang masa huniannya sudah mau berakhir, itu hampir 400 konsumen. Nah, ini siap dialihkan ke BP2BT," katanya.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi pengembang perumahan masyarakat perumahan rakyat (MBR) meminta agar peraturan Menkeu ini bisa berjalan maksimal agar kuota untuk rumah subsidi ditambahkan.

Ketua Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (Himpera)

pengembang dan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.

Namun, menurutnya, PMK itu tidak bisa dilaksanakan dengan lancar dan maksimal apabila kuota untuk rumah subsidi masih belum ditambah. Keluarnya PMK dinilai akan mempercepat pengurangan kuota rumah subsidi.

takan bahwa rencana untuk menambah anggaran tahun ini belum akan ada lagi.

Adapun, kuasa untuk menambah anggaran pembiayaan perumahan berada di tangan Kementerian Keuangan. Adang menyebutkan bahwa penambahan anggaran mungkin baru akan ada tahun depan.

Selain itu, ketika menyikapi keinginan pengembang, Kementerian PUPR mengarahkan agar pengembang menyediakan rumah yang sesuai dengan skema SSB dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

"Baik FLPP, SSB atau BP2BT sebelumnya sama menguntungkan bagi konsumen. Saat ini kami sedang *nih*, untuk dorong di SSB, BP2BT juga sudah *standby*. Bedanya *kalo* BP2BT itu kan di awal subsidinya, bantuan uang mukanya, selebihnya, nanti bank bisa mengelola secara komersial. Lebih terbuka juga," kata Adang.

Namun, ada regulasi yang berbeda pada skema BP2BT, yaitu kewajiban untuk menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF).

"Beberapa daerah sudah mulai bisa menerbitkan SLF itu. Saya yakin bisa segera berjalan normal karena banyak

Endang Kawidjaja menyebutkan bahwa anggaran perumahan MBR seperti FLPP, yang paling umum, baiknya ditambahkan. Belum lagi target program sejuta rumah dari pemerintah tahun ini naik menjadi 1,25 juta unit.

"Kalau dilihat dari tren 2 tahun terakhir, setidaknya tahun ini 260.000 kapasitas realisasinya yang formal perumahan. Dahulu 2017 sampai 230.000-an, terus hampir 250.000 pada 2018, selanjutnya BTN konsisten di 219.000—220.000, dan bank lain naik dari 2017 hanya sekitar 11.000 jadi 25.000-an. harusnya tahun ini meningkat lagi realisasinya dari 225.000 menjadi 255.000—260.000 lah *gitu*, tapi malah *diturunin* anggarannya," ujarnya.

Menurut Endang, makin banyak anggaran yang digelontorkan bisa jadi makin baik, bagi pengembang maupun konsumen sehingga bisa ikut andil dalam mengurangi kesenjangan pasokan (*backlog*) hunian.

Adapun, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyambut positif terbitnya nilai PMK itu karena bisa lebih menguntungkan

"Kalau sekarang 168.000 unit [dari subsidi selisih bunga dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan], sangat jauh jumlahnya dari tahun kemarin yang sampai 280.000-an unit. Andai kata tidak ditambah, [tujuan] PMK tidak akan teresap nanti karena realisasinya akan sangat kecil dan akan sangat membahayakan bagi bisnis properti khususnya rumah subsidi," ujarnya, menjelang akhir Mei lalu.

Karena serapan dari masyarakat sangat tinggi, sedangkan hampir semua pengembang terbebani oleh bunga bank, hal itu bisa menghambat produksi, pengembang tidak bisa menjual produknya, akhirnya berdampak langsung pada bisnis pengembang.

"Sebenarnya sangat menguntungkan buat pengembang dan MBR yang perlu rumah karena ini jadi jalan tengah dari kenaikan harga tanah dan material, maknanya itu PMK harus dikeluarkan sesuai dengan zona masing-masing daerah. Dengan adanya PMK yang baru bisa mengurangi *backlog* [kesenjangan pasokan], pasti, saya pikir program baik pasti bisa mengurangi *backlog*, tetapi



Untuk mendukung program mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, berupa rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana, pemerintah memberi fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.

Batasan Harga Jual Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Rp juta)

ZONA/TAHUN	2019	2020
Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi/Jabodetabek) dan Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai)	140	150,50
Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu)	153	164,50
Sulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, dan Kep. Riau (kecuali Kep. Anambas)	146	156,50
Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, dan Kep. Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakam Ulu	158	168
Papua dan Papua Barat	212	219

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya. *Bisnis/Petricia Cahya Pratini yang Atas Penyerahannya Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.*

kan *ergak* bisa jalan masing-masing,"

Junaidi menjelaskan bahwa jika PMK keluar, tetapi kuota sedikit, hal itu akan

menjadi percuma. Belum lagi sampai sekarang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk batasan harga juga belum resmi keluar.

Judul	Investor Milenial Naik	Tanggal	Senin, 17 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Investor properti dari generasi milenial terus mengalami peningkatan, bahkan mereka berani membeli properti di luar negeri tanpa pernah mendatangi lokasinya secara langsung. Berdasarkan riset yang dilansir Bloomberg Intelligence, Minggu (16/6), bahwa saat ini ada kenaikan lebih dari 60% pembelian properti oleh generasi milenial di China. Jumlah transaksinya mencapai US\$740 juta atau setara dengan Rp10,50 triliun pada 2018. Angka itu diproyeksikan meningkat dua kali lipat pada 2019		

► PEMBELIAN RUMAH

Investor Milenial Naik

Bisnis, JAKARTA — Investor properti dari generasi milenial terus mengalami peningkatan, bahkan mereka berani membeli properti di luar negeri tanpa pernah mendatangi lokasinya secara langsung.

Berdasarkan riset yang dilansir Bloomberg Intelligence, Minggu (16/6), bahwa saat ini ada kenaikan lebih dari 60% pembelian properti oleh generasi milenial di China. Jumlah transaksinya mencapai US\$740 juta atau setara dengan Rp10,50 triliun pada 2018. Angka itu diproyeksikan meningkat dua kali lipat pada 2019.

Generasi milenial China dinilai lebih melirik untuk investasi properti di Asia Tenggara lantaran harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan di Beijing, Shanghai, terlebih Hong Kong.

Sebelumnya, para investor milenial cenderung membidik Selandia Baru, Kanada, Singapura, dan Australia. Namun, sederetan negara itu memiliki beberapa regulasi terkait dengan larangan kepemilikan properti oleh orang asing. Oleh karena itu, para investor muda mulai melirik Thailand, Indonesia, dan Filipina, ditambah adanya kemudahan membeli melalui situs properti daring.

Riset itu mengungkapkan bahwa pada investor dari kaum milenial,

sebanyak 50% di antaranya sudah berani membeli tanpa pernah mendatangi lokasi. Sementara itu, 22% lainnya hanya melihat sekilas dan menyaksikan sekilas.

Di Indonesia, CEO dan Chairman Crown Group Iwan Sunito menyebutkan bahwa ternyata banyak generasi milenial yang berinvestasi properti di Australia. Biasanya para pembeli properti di Australia tempat tinggal anak-anak mereka pada masa datang, untuk sekolah atau kerja di sana.

“Saat anak-anak beranjak [masuk] SMU atau mau memasuki jenjang kuliah, mereka tinggal di apartemen ini. Sebelumnya, apartemen ini disewakan kepada orang,” ungkapnya melalui siaran pers, belum.

Sebelumnya, satu riset yang dilakukan media daring menyebutkan bahwa sebagian besar generasi milenial menginginkan rumah baru sebagai hunian mereka dan sangat resisten terhadap rumah bekas sehingga menjadi peluang bagi pengembang.

Selain itu, milenial cenderung lebih mengutamakan konektivitas atau akses transportasi yang terintegrasi dan dekat dengan berbagai fasilitas yang mereka butuhkan termasuk kedai kopi atau ruang kerja bersama (sebagai gaya hidup). *(Mutlira Nabila)*

Judul	2 Bulan lagi kuota KPR Bersubsidi Habis	Tanggal	Senin, 17 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 12)		
Resume	Kuota Pembiayaan rumah bersubsidi sebesar 168 ribu unit diperkirakan habis pada Juli atau Agustus mendatang. Dengan masih tingginya permintaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan rumah bersubsidi yang dilakukan pengembang, habisnya kuota rumah bersubsidi ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebab bisa berdampak panjang bagi konsumen dan developer.		

2 Bulan lagi Kuota KPR Bersubsidi Habis

KUOTA pembiayaan rumah bersubsidi sebesar 168 ribu unit diperkirakan habis pada Juli atau Agustus mendatang.

Dengan masih tingginya permintaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan rumah bersubsidi yang dilakukan pengembang, habisnya kuota rumah bersubsidi ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebab bisa berdampak panjang bagi konsumen dan developer.

Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada 2018 target rumah bersubsidi pemerintah sebesar 292 ribu unit, yang terdiri atas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 67 ribu unit dan subsidi selisih bunga (SSB) 225 ribu unit.

Namun, pada 2019 angka kuota justru turun menjadi hanya sekitar 168 ribu unit dengan komposisi skema FLPP 68 ribu unit dan SSB hanya 100 ribu unit.

"Sampai Juni ini sudah terealisasi 79%. Artinya sisanya sekitar 30 ribu lagi akan habis di Juli atau Agustus," ujar Junaidi saat dihubungi, akhir pekan lalu.

Junaidi menambahkan bahwa di beberapa daerah kuota subsidi bahkan sudah dihentikan. Dari sisi konsumen, habisnya kuota pembiayaan rumah bersubsidi itu akan membuat beban cicilan bagi MBR bertambah berat.

Pengembang pun terancam bangkrut sebab mereka memakai dana pihak ketiga yakni perbankan. Ketika pengembang tidak bisa melakukan realisasi, akan bisa meningkatkan NPL di perbankan, dan memicu kebangkrutan.

"Selain itu, tentu bila kuota habis, akan memengaruhi bisnis lainnya yaitu industri yang terkait perumahan," jelas Junaidi.

Bahkan, ia juga mengkhawatirkan perihal penyesuaian harga rumah bersubsidi terbaru. Peningkatan tersebut juga berpotensi mengurangi besaran unit yang dapat disubsidi.

"Penyesuaian harga rumah pun bisa mengurangi kuota sebab harga disesuaikan, tetapi subsidi tidak ditambah," tandasnya.

Saat ini ada 19 bank yang melayani KPR bersubsidi, yaitu seluruh bank BUMN dan ditambah beberapa bank pembangunan daerah (BPD) serta swasta. (Try/E-1)

Judul	Tata Ruang Kalimantan Mendesak Direvisi	Tanggal	Senin, 17 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 16)		
Resume	Persoalan tata ruang masih menjadi salah satu kendala pemindahan ibukota ke Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, masih banyak konsesi di luar hak guna usaha. Sementara di Kalimantan Timur, salah satu lokasi alternatif ibukota, merupakan kawasan konservasi. Hal itu mengemuka dalam seminar "Menyambut Ibukota Pemerintahan NKRI" yang diselenggarakan		

Tata Ruang Kalimantan Mendesak Direvisi

PALANGKARAYA, KOMPAS — Persoalan tata ruang masih menjadi salah satu kendala pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, masih banyak konsesi di luar hak guna usaha. Sementara di Kalimantan Timur, salah satu lokasi alternatif ibu kota, merupakan kawasan konservasi.

Hal itu mengemuka dalam seminar "Menyambut Ibu Kota Pemerintahan NKRI" yang diselenggarakan Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia di Palangkaraya, Sabtu (15/6/2019). Hadir sebagai pembicara Gubernur Kalteng periode 2005-2015 Agustin Teras Narang dan Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alue Dohong.

Menurut Teras Narang, Kalteng siap menjadi ibu kota negara sejak tahun 1957 saat Soekarno ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Kini, saat wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat, persoalan tata ruang muncul lagi ke permukaan. "Pedoman untuk menyelesaikan masalah itu ada dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015. Tinggal disesuaikan di setiap kabupaten," kata Teras Narang.

Perda itu dibuat saat Teras Narang memimpin Kalteng. Dalam membuat kebijakan, pihaknya melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait. "Kabupaten-kabupaten seharusnya bisa merevisi perda masing-masing sehingga ada perubahan," ujarnya.

Hal senada dinyatakan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalteng 2015-2016 Sipet Hermanto yang kini menjadi anggota DPR terpilih. Menurut dia, penyelesaian tata ruang harus melihat sejarah rencana tata ruang dan wilayah di Kalteng.

"Saat menjadi ibu kota provinsi, Palangkaraya masih kawasan hutan. Banyak kendala saat itu dan banyak aturan tidak ditindaklanjuti pusat, termasuk konsesi," tutur Sipet.

Sipet menjelaskan, tahun 1982, ada instruksi Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Kehutanan untuk membuat tata guna kawasan. Saat itu kawasan hutan di Kalteng 98 persen. Namun, tata guna kawasan dibuat tanpa pengukuran dan penataan batas-batas wilayah.

"Kalau saat itu dilakukan pengukuran dan tata batas, maka bisa dipisahkan antara kabupaten, kecamatan, desa, dan lainnya," ujar Sipet.

Dia menambahkan, keterlanjutan itu berlanjut hingga terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 dan Perda Nomor 8 Tahun 2003. Saat itu kawasan hutan sudah berkurang menjadi 66 persen. "Namun, pemerintah pusat tidak mengakui itu. Padahal, saat itu pimpinan daerah sudah mengeluarkan banyak izin konsesi berdasarkan perda yang ada," kata Sipet. Akibatnya, pada Perda No 5/2015, kawasan hutan meningkat menjadi 80 persen, sedangkan kawasan nonhutan menyusut hingga 20 persen. Sampai saat ini, belum ada revisi perda. Hal ini berpotensi membingungkan di lapangan.

Alue Dohong mengatakan, akibat pemindahan ibu kota akan ada kawasan hutan yang dibuka. Namun, dengan konsep *green and smart city*, proses pembukaan hutan bisa dibatasi. "Jangan dibabat semua tanaman, sebagian dipertahankan dan dipelihara. Ibu kota, kan, fungsi administratif, bukan pusat bisnis," ujar Alue. (IDO)

Saat menjadi ibu kota provinsi, Palangkaraya masih kawasan hutan. Banyak kendala saat itu dan banyak aturan tidak ditindaklanjuti pusat.